

## Peran dan Tantangan *Digital Policing* dalam Penanggulangan Dinamika Kejahatan Kontemporer

Fajar Kiansantang  
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

E-mail: [kiansantangfajar7@gmail.com](mailto:kiansantangfajar7@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan kejahatan kontemporer menuntut Polri untuk mengadopsi pendekatan pemolisian yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan tantangan *digital policing* dalam penanggulangan dinamika kejahatan kontemporer, khususnya pada konteks Polres Metro Jakarta Pusat. Fokus kajian diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu kemampuan kepemimpinan dalam menginspirasi anggota, pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas, dan penguatan kolaborasi internal maupun eksternal. Hasil kajian menunjukkan bahwa *digital policing* memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi operasional Polri, terutama dalam meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala utama ditemukan pada belum meratanya kapasitas kepemimpinan digital, belum maksimalnya integrasi teknologi dalam tugas operasional, serta masih terbatasnya kolaborasi lintas fungsi dengan para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan dan kinerja harkamtibmas di tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, implementasi *digital policing* perlu diarahkan pada pengembangan kepemimpinan digital, peningkatan kompetensi teknologi personel, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepolisian, serta pembangunan pola kolaborasi yang adaptif tanpa mengabaikan *human touch* dalam pelayanan kepolisian. Dengan penguatan tersebut, *digital policing* berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menghadapi dinamika kejahatan kontemporer secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** *digital policing*, Polri, kejahatan kontemporer, kamtibmas, kepercayaan publik

### ABSTRACT

The development of contemporary crime requires police institutions to adopt a more adaptive, responsive, and technology-based policing approach. This article aims to analyze the role and challenges of *digital policing* in addressing the dynamics of contemporary crime, particularly in the context of Polres Metro Jakarta Pusat. The analysis focuses on three main dimensions, namely leadership capacity in inspiring personnel, the use of technology in operational duties, and the strengthening of internal and external collaboration. The findings indicate that *digital policing* plays a strategic role in supporting the operational transformation of the Indonesian National Police, especially in improving the effectiveness of public security and order maintenance and strengthening public trust. However, its implementation has not yet been fully optimal. The main challenges lie in the uneven capacity of digital leadership, the limited integration of technology into operational practices, and the still-restricted collaboration across units and with stakeholders. These conditions affect the quality of public service and the effectiveness of security maintenance

*at the territorial level. Therefore, implementation of digital policing should be directed toward the development of digital leadership, the improvement of personnel's technological competence, the optimization of police information systems, and the establishment of adaptive collaboration patterns without neglecting the human touch in policing services. With these improvements, digital policing has the potential to become a strategic instrument for addressing contemporary crime dynamics more effectively and sustainably.*

**Keyword :** *digital policing, Polri, contemporary crime, public order, public trust*

## 1. PENDAHULUAN

Kepercayaan publik merupakan modal institusional yang sangat menentukan keberlanjutan dan efektivitas kinerja suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun sektor nonpemerintahan. Dalam konteks pemolisian, legitimasi dan kepercayaan publik tidak hanya membentuk persepsi positif terhadap institusi, tetapi juga berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kemauan untuk bekerja sama dengan polisi, serta dukungan terhadap kebijakan pemolisian yang dijalankan. Dengan demikian, kepercayaan publik harus dipahami sebagai prasyarat strategis bagi efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian, bukan sekadar konsekuensi reputasional dari pelayanan yang baik (Sunshine & Tyler, 2003).

Bagi Polri, urgensi penguatan kepercayaan publik menjadi semakin relevan karena institusi ini menjalankan agenda transformasi jangka panjang sebagaimana termuat dalam Grand Strategi Polri 2005–2025. Dokumen tersebut membagi pembangunan Polri ke dalam tiga tahap, yaitu *trust building*, *partnership building*, dan *strive for excellence*. Tahap ketiga diarahkan untuk membangun kapasitas pelayanan publik yang unggul. Dalam perkembangan terkini, orientasi tersebut juga diperkuat melalui agenda Presisi yang menekankan bahwa transformasi Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kondisi yang dielaborasi

secara profesional, proporsional, dan adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman (Polri, 2005; Zahra et al., 2020; Listyo Sigit Prabowo dalam Korlantas Polri, 2021; Tribrata News, 2024).

Selain itu, hubungan antara kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik bersifat erat. Kondisi yang antara lain dipengaruhi karena pengalaman layanan yang positif cenderung memperkuat persepsi legitimasi institusi. Dalam konteks Polri, hasil Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan secara tatap muka pada 22 Oktober–15 November tahun 2023 terhadap 3.400 responden menunjukkan bahwa 87,8% publik menyatakan puas terhadap kinerja Polri. Survei serupa juga mencatat bahwa kepuasan terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mencapai lebih dari 89%. Namun, aspek layanan pengaduan masyarakat masih dinilai perlu diperbaiki, terutama pada dimensi responsivitas, kemudahan akses, dan transparansi proses penanganan aduan (Litbang Kompas, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan publik tidak dapat dilepaskan dari mutu pelayanan yang konsisten, terbuka, dan akuntabel di seluruh lini fungsi Polri.

Dalam konteks kewilayahan, Polres Metro Jakarta Pusat dapat dikategorikan sebagai satuan dengan beban tugas yang sangat kompleks karena berada di kawasan strategis pusat pemerintahan, objek vital nasional, dan sebaran titik aksi penyampaian pendapat. Kompleksitas ini tampak dari tingginya intensitas

pengamanan aksi massa di kawasan Monas dan DPR/MPR yang secara berkala memerlukan pengerahan personel dalam jumlah besar.

Di sisi lain, publikasi Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2023 yang dirilis BPS menunjukkan bahwa Jakarta Pusat termasuk wilayah dengan beban kriminalitas yang relatif tinggi, yakni 1.711 kasus. Situasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta Pusat memiliki implikasi langsung terhadap persepsi publik mengenai kapasitas Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas di ruang urban yang padat, dinamis, dan politis (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024; Tribatanews Polda Metro Jaya, 2024).

Dinamika kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya menerima sebanyak 74.013 laporan polisi atau sekitar 16% dari total 329.120 laporan polisi yang diterima secara nasional. Kondisi yang menjadikan wilayah tersebut dengan volume laporan tertinggi di Indonesia (Detikcom, 2025).

Tingginya beban penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa wilayah metropolitan Jakarta menghadapi tantangan keamanan yang jauh lebih kompleks dibandingkan banyak wilayah lainnya di Indonesia. Selain kejahatan konvensional, aparat kepolisian juga dihadapkan pada berbagai bentuk gangguan keamanan perkotaan yang menuntut kecepatan respons dan kemampuan adaptasi organisasi yang tinggi (ANTARA, 2025; Detikcom, 2025).

Sejumlah kasus kriminal yang terjadi di Jakarta Pusat turut memperlihatkan urgensi penguatan sistem pemolisian modern. Pada Juni 2025, seorang jurnalis perempuan menjadi korban penembakan di kawasan Halte Balai Kota Jakarta. Beberapa bulan

kemudian, pada Desember 2025, seorang perempuan berusia 21 tahun meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor saat menjadi korban penembakan di kawasan Kemayoran. Selain itu, aparat juga mengungkap kasus penadahan kendaraan bermotor hasil curian yang beroperasi di wilayah Jakarta Pusat (ANTARA, 2025). Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa *street crime* masih menjadi tantangan nyata yang membutuhkan respons cepat, akurat, dan didukung teknologi pengawasan yang memadai.

Terkait kerangka reformasi kelembagaan, transformasi operasional Polri menuntut kemampuan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi *added value* bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kinerja harkamtibmas tidak cukup hanya ditopang oleh struktur dan prosedur, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang adaptif. Hal ini sejalan dengan penegasan Kapolri bahwa transformasi Polri Presisi harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan adaptif dalam merespons tuntutan perkembangan zaman. Beberapa literatur kepemimpinan juga menjelaskan bahwa lingkungan VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*) menuntut organisasi membangun kelincahan (*agility*), kemampuan membaca perubahan, serta respons cepat berbasis pembelajaran berkelanjutan (Tribata News, 2024; Baran & Woznyj, 2020).

Kompleksitas tugas Polres Metro Jakarta Pusat tidak hanya berasal dari aspek kriminalitas, tetapi juga dari tingginya frekuensi pengamanan aksi penyampaian pendapat. Sebagai gambaran pada tahun 2025, Polda Metro Jaya tercatat mengamankan 2.304 kegiatan unjuk rasa di berbagai titik strategis ibu kota. Dalam beberapa kegiatan, Polri harus mengerahkan ribuan personel secara simultan, seperti pengamanan aksi demonstrasi pengemudi ojek *online* yang melibatkan 6.118

personel gabungan serta aksi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang memerlukan pengerahan 4.625 personel (Detikcom, 2025). Besarnya kebutuhan personel dalam pengamanan kegiatan masyarakat menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai faktor pengganda kekuatan (*force multiplier*) guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons operasional kepolisian.

Berangkat dari kondisi tersebut, *digital policing* menjadi salah satu model strategis yang relevan untuk menjawab dinamika kejahatan kontemporer. Secara substantif, *digital policing* dapat dipahami sebagai pendekatan pemolisian yang memanfaatkan integrasi teknologi, data, dan inovasi operasional untuk meningkatkan *situational awareness*, efisiensi respons, kualitas pembuktian, dan keselamatan personel maupun masyarakat. Penggunaan teknologi seperti *body-worn cameras*, *drone*, dan *artificial intelligence* (AI) menunjukkan bahwa pemolisian modern bergerak ke arah sistem yang lebih prediktif, responsif, dan berbasis bukti. Namun demikian, implementasi *digital policing* juga menghadapi tantangan serius berupa kesiapan SDM, integrasi sistem, tata kelola data, serta potensi *regulatory lag*, yaitu kondisi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk mengaturnya secara memadai (Davies & Krame, 2023; Fussey & Sandhu, 2022).

Dengan demikian, upaya Polres Metro Jakarta Pusat untuk memperkuat harkamtibmas melalui pendekatan *digital policing* harus dibaca sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar inovasi teknis. Efektivitas pendekatan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kesiapan personel, budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, serta kemampuan institusi menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak

warga negara. Apabila hambatan pada level pimpinan maupun anggota tidak diatasi secara sistematis, maka *digital policing* berisiko berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya menjadi instrumen transformasi operasional yang berdampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan publik.

Kondisi tingginya angka kriminalitas, besarnya volume laporan polisi, serta meningkatnya kebutuhan pengerahan personel dalam pengamanan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan pemolisian konvensional yang bersifat reaktif semakin menghadapi keterbatasan (ANTARA, 2025). Dalam situasi tersebut, transformasi menuju *digital policing* menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pengawasan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendukung efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan yang kompleks seperti Jakarta Pusat.

## 2. LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis berdasar perkembangan teknologi pengawasan penegakan hukum menghadirkan pergeseran paradigma yang substansial, bukan sekadar peningkatan efisiensi dari metode di masa lalu (Ferguson, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologis yang mengemukakan bahwa adopsi *big data* dalam kepolisian telah mengamplifikasi sekaligus mengubah sifat dasar aktivitas pengawasan itu sendiri (Brayne, 2017). Untuk menelaah fenomena kepolisian berbasis data digital secara komprehensif, kerangka teori ini membedah transformasi teknologi pengawasan melalui tiga dimensi utama, yakni hakikat tindakan, hasil pengawasan, dan skalabilitas (Ferguson, 2022).

Aspek pertama dari segi hakikat tindakan (*the act*), sistem kepolisian analog melakukan pengawasan sebagai

sebuah tindakan investigasi fisik yang diskrit, bersifat tunggal, dan dibatasi secara ketat oleh kemampuan biologis pancaindera serta ketersediaan waktu pengamat manusianya (Ferguson, 2022). Sebaliknya, pada era digital, tindakan pengawasan berubah rupa menjadi sistem pengumpulan data berkesinambungan yang bekerja secara otomatis, selalu aktif (*always-on*), masif, dan teragregasi (Ferguson, 2022). Kepolisian modern saat ini mengandalkan algoritma dan sensor untuk mengumpulkan jejak data yang kemudian merubah konsep kecurigaan menjadi sekadar kalkulasi probabilitas matematis (Ferguson, 2017).

Aspek kedua transformasi ini juga terlihat dengan sangat jelas dari hasil pengawasan (*the result*) yang diproduksi. Secara konvensional, bentuk pengawasan masa lampau umumnya berfokus pada pengumpulan bukti spesifik yang hanya bermanfaat untuk kepentingan satu investigasi tertentu (Ferguson, 2022). Di era modern, pengawasan memproduksi pangkalan data berisi jejak digital dalam skala yang besar, mendalam, dan bersifat eksploitatif secara analitik. Terbentuknya pangkalan data raksasa semacam ini pada akhirnya menurunkan ambang batas inklusivitas pengawasan, sehingga masyarakat umum yang tidak pernah bersentuhan dengan kriminalitas pun kini berpotensi masuk ke dalam pantauan otomatis sistem kepolisian (Brayne, 2017).

Aspek ketiga dimensi skala dan skalabilitas (*scale and scalability*) menunjukkan perbedaan operasional yang mencolok antara instrumen lama dan instrumen mutakhir (Ferguson, 2022). Teknologi kepolisian saat ini dilahirkan sebagai bagian integral dari ekosistem jaringan infrastruktur digital (Ferguson, 2022).

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi

kasus. Pendekatan ini dipilih karena berupaya memahami secara mendalam implementasi *digital policing* dalam konteks nyata organisasi kepolisian, khususnya di Polres Metro Jakarta Pusat. Desain studi kasus dipandang tepat untuk menelaah fenomena kontemporer yang batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas, terutama ketika penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat “bagaimana” dan “mengapa” (Yin, 2018).

Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu kemampuan menginspirasi anggota, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan *digital policing* di Polres Metro Jakarta Pusat. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap implementasi *digital policing* (Ahmad & Wilkins, 2024). Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi dan relevansi data dibandingkan jumlah partisipan semata (Creswell & Poth, 2024).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh data yang mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian (Ruslin et al., 2022). Observasi dilakukan untuk menangkap praktik pelaksanaan tugas, interaksi kerja, dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan kepolisian. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen yang relevan, seperti kebijakan internal, laporan kegiatan, dan data pendukung lainnya. Penggunaan berbagai sumber data tersebut dilakukan untuk memperkuat kedalaman deskripsi kasus sekaligus mendukung proses triangulasi (Smith, 2018).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model

Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kompilasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemeliharaan kamtibmas tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai fungsi kehadiran personel di lapangan, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara legitimasi publik, kapasitas kepemimpinan, dan kesiapan digital organisasi. Dalam konteks ini, kinerja kamtibmas yang efektif akan memperkuat kepercayaan publik, sementara lemahnya kualitas kepemimpinan dan rendahnya adaptasi teknologi berpotensi menghambat *institutional trust* terhadap Polri.

Dari perspektif kepemimpinan digital, temuan di Polres Metro Jakarta Pusat menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan transformasi dan kapasitas aktual sebagian pimpinan. Larjovuori, Bordi, dan Heikkilä-Tammi (2018) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam transformasi digital setidaknya mencakup empat fokus utama, yaitu visi strategis dan tindakan, memimpin perubahan budaya, *enabling*, dan *leading networks*. Dengan menggunakan kerangka ini, situasi di Polres Metro Jakarta Pusat menunjukkan bahwa visi strategis telah mulai terbentuk. Sehingga, tantangan utama bukan hanya soal penguasaan teknologi oleh pimpinan, tetapi juga bagaimana teknologi itu diterjemahkan menjadi budaya kerja baru yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil (Larjovuori et al., 2018; Adie et al., 2024).

Dengan kata lain, kepemimpinan digital di lingkungan kepolisian perlu bergerak dari sekadar penggunaan teknologi menuju pembinaan manusia dalam ekosistem digital (Bass, 1985; Avolio et al., 2000). Kondisi keterbatasan

personel juga memperumit implementasi transformasi operasional. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan digital semestinya berfungsi sebagai *force multiplier*, yakni memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, pemetaan ancaman, dan respons operasional tanpa sepenuhnya bergantung pada penambahan kekuatan fisik. Apabila organisasi belum memiliki cukup pelatihan, tidak semua pimpinan memiliki orientasi inovatif, dan budaya kerja lama masih dominan, maka teknologi berisiko hanya menjadi instrumen administratif, bukan pengungkit transformasi operasional yang sesungguhnya (Davies & Krame, 2023; Fussey & Sandhu, 2022).

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi operasional Polri Presisi di tingkat kewilayahan menghadapi tantangan yang bersifat simultan. Tantangan tersebut meliputi aspek kepemimpinan, tantangan kompetensi digital, dan tantangan organisasi. Pada satu sisi, tuntutan terhadap pemimpin semakin tinggi karena mereka harus responsif terhadap lingkungan VUCA yang ditandai perubahan cepat, kompleksitas, dan ketidakpastian.

Pada sisi lain, organisasi memerlukan infrastruktur pembelajaran yang memungkinkan anggota beradaptasi dengan sistem kerja digital secara berkelanjutan. Oleh karena itu, isu utama yang muncul bukan sekadar ada atau tidaknya teknologi, tetapi apakah kepemimpinan di tingkat Polres mampu membangun ekosistem pembelajaran, budaya inovasi, dan penggunaan teknologi yang berdampak langsung pada kualitas harkamtibmas. Sehingga, *digital policing* menjadi kunci untuk menjembatani tuntutan modernisasi organisasi dengan realitas lapangan yang masih menghadapi keterbatasan personel, variasi kompetensi, dan resistensi terhadap perubahan (Baran & Woznyj, 2020; Larjovuori et al., 2018).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tantangan utama Polres Metro Jakarta Pusat dalam mengoptimalkan *digital policing* bukan semata terletak pada aspek teknologi, melainkan pada kapasitas pimpinan untuk mengorkestrasi perubahan. Kepemimpinan digital yang efektif harus mampu menghadirkan teladan, mendorong inovasi, memperluas kolaborasi, dan memastikan setiap anggota memiliki dukungan yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan sistem kerja. Tanpa penguatan pada dimensi tersebut, transformasi operasional berpotensi berjalan parsial dan belum menghasilkan dampak maksimal terhadap peningkatan kinerja harkamtibmas maupun penguatan kepercayaan publik kepada Polri (Korlantas Polri, 2021; Davies & Krame, 2023; Adie et al., 2024).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran dan tantangan *digital policing* dalam penanggulangan dinamika kejahatan kontemporer di Polres Metro Jakarta Pusat dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kemampuan kepemimpinan dalam menginspirasi anggota, pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas, dan penguatan kolaborasi internal maupun eksternal. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *digital policing* belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga belum mampu memberikan penguatan yang maksimal terhadap efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta peningkatan kepercayaan publik.

Pada dimensi pertama, aspek kepemimpinan digital yang berorientasi pada kemampuan menginspirasi anggota masih menghadapi kendala karena belum seluruh pimpinan mampu berperan sebagai teladan, penggerak, dan pembina perubahan dalam organisasi.

Pada dimensi kedua, pemanfaatan teknologi juga belum optimal karena masih terdapat pimpinan yang belum secara konsisten mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pelaksanaan tugas operasional pada satuannya masing-masing.

Sementara itu, pada dimensi ketiga, aspek kolaborasi masih menunjukkan keterbatasan karena sebagian pimpinan belum mendorong kerja sama lintas fungsi, lintas level, dan dengan para pemangku kepentingan secara optimal. Hal ini berimplikasi pada belum kuatnya sinergi dalam pemeliharaan kamtibmas, baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Oleh karena itu, *penguatan digital policing* di Polres Metro Jakarta Pusat memerlukan langkah-langkah strategis, komprehensif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan komitmen kepemimpinan digital, peningkatan literasi dan kompetensi teknologi anggota, optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi dalam tugas operasional, serta pembangunan pola kolaborasi yang lebih adaptif dengan anggota, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Selain itu, penerapan *digital policing* juga harus tetap menjaga *human touch* dalam pelayanan dan pengawasan, sekaligus responsif terhadap tantangan ruang digital seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Apabila ketiga dimensi tersebut dapat diperkuat secara simultan, maka *digital policing* berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pemeliharaan kamtibmas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

Adie, B. U., Tate, M., & Valentine Wellington, E. (2024). Digital leadership in the public sector: A scoping review and outlook. *International Review of Public*

- Administration, 29(1), 42–58.  
<https://doi.org/10.1080/12294659.2024.2323847>
- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- ANTARA News. (2025). *Kriminal kemarin, kasus premanisme 2025 hingga DJ Donny diteror*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5329378/kriminal-kemarin-kasus-premanisme-2025-hingga-dj-donny-diteror>
- Avolio, B. J., Kahai, S., & Dodge, G. E. (2000). E-leadership: Implications for theory, research, and practice. *The Leadership Quarterly*, 11(4), 615–668.  
[https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(00\)00062-X](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(00)00062-X)
- Baran, B. E., & Woznyj, H. M. (2020). Managing VUCA: The human dynamics of agility. *Organizational Dynamics*, Article 100787. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2020.100787>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Statistik kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2023*.
- Brayne, S. (2017). Big data surveillance: The case of policing. *American Sociological Review*, 82(5), 977–1008.  
<https://doi.org/10.1177/0003122417725865>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davies, A., & Krame, G. (2023). Integrating body-worn cameras, drones, and AI: A framework for enhancing police readiness and response. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17, paad083. <https://doi.org/10.1093/polic/paad083>
- Detikcom. (2025). *7 capaian Polda Metro sepanjang 2025*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8287136/7-capaian-polda-metro-sepanjang-2025>
- Ferguson, A. G. (2017). *The rise of big data policing: Surveillance, race, and the future of law enforcement*. New York University Press.
- Ferguson, A. G. (2022). Why digital policing is different. *Ohio State Law Journal*, 83(5), 817–856.
- Fussey, P., & Sandhu, A. (2022). Surveillance arbitration in the era of digital policing. *Theoretical Criminology*, 26(1), 3–22.  
<https://doi.org/10.1177/1362480620967020>
- Korlantas Polri. (2021, December 3). *Kapolri: Konsep Presisi harus dirasakan di hati masyarakat, bukan sekedar jargon*. <https://korlantas.polri.go.id/kapolri-konsep-presisi-harus-dirasakan-dihati-masyarakat-bukan-sekedar-jargon/>
- Larjovuori, R.-L., Bordi, L., & Heikkilä-Tammi, K. (2018). Leadership in the digital business transformation. In *Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference* (pp. 212–221). ACM. <https://doi.org/10.1145/3275116.3275122>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Polri. (2005). *Grand strategi Polri, 2005–2025: Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni*

2005. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ruslin, R., Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). Semi-structured interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education*, 12(1), 22–29.
- Smith, P. R. (2018). Collecting sufficient evidence when conducting a case study. *The Qualitative Report*, 23(5), 1054–1068. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3536>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513–547. <https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002>
- Tribrata News. (2024, June 7). Kapolri dorong transformasi Polri Presisi demi visi Indonesia Emas 2045. <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-dorong-transformasi-polri-presisi-demi-visi-indonesia-emas-2024-74941>
- Tribrataneews Polda Metro Jaya. (2023, December 26). Survei Litbang Kompas: 87,8% masyarakat puas dengan kinerja Polri. <https://tribrataneews.metro.polri.go.id/survei-litbang-kompas-878-masyarakat-puas-dengan-kinerja-polri/>
- Tribrataneews Polda Metro Jaya. (2024, July 8). 1.304 personil Polri, siap amankan unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat. <https://tribrataneews.metro.polri.go.id/1-304-personil-polri-siap-amankan-unjuk-rasa-di-patung-kuda-jakarta-pusat/>
- Zahra, F., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Strategi satuan intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan menuju pelayanan prima. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/27180/>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.